



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG PURNOMO**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **15546**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.410.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/357 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/194 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/137 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/34 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 374.000.000**

1. MOBIL, FORD ECOSPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 11.000.000**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 691.404.056 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 6.486.404.056 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 6.486.404.056 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.